

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERINTAH ACEH
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jalan Tgk. Chik Kuta Karang No. 03 Telp. (0651) 26206, 23692, Fax. 33723
Website: www.disbudpar.acehprov.go.id Email: disbudpar@acehprov.go.id

PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja. Penyusunan LKiJ Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2025. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah mengembangkan strategi, program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mendukung visi dan misi pemerintah melalui 10 (sepuluh) program teknis yakni : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (2) Program Pengembangan Kebudayaan, (3) Program Pengembangan Kesenian Tradisional, (4) Program Pembinaan Sejarah, (5) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, (6) Program Pengelolaan Permuseuman, (7) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, (8) Program Pemasaran Pariwisata, (9) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan (10) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kesepuluh program teknis dirinci menjadi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang dengan masing-masing capaian prioritas pada Tahun 2025.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut :

Laporan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
URUSAN KEBUDAYAAN						
1	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,9	1,76	93%	Capaian kinerja belum mencapai target dalam RPA karena masih menggunakan data Triwulan III (Sumber Data : BPS)
2	Rasio Pelestarian Cagar Budaya	%	28,39	24,85	88%	Capaian kinerja tidak mencapai target karena terdapat prioritas pemeliharaan dan pemugaran situs cagar budaya yang sudah ada juru peliharanya. Juga terdapat permasalahan keterbatasan anggaran yang tersedia untuk kebutuhan Cagar Budaya. (Sumber Data : Disbudpar)
3	Rasio Jumlah Pengunjung Museum	Rasio pengunjung /1000	130,9	120,26	92%	Capaian kinerja belum mencapai target dalam RPA karena adanya pelaksanaan rehabilitasi Gedung Museum Tsunami tahun 2025 (Sumber Data : Disbudpar)
4	Kunjungan wisatawan	Orang	2.836.869	18.345.784	647%	Capaian kinerja melebihi target dalam RPA (Sumber Data : BPS)
5	Lama kunjungan wisatawan	Hari	3	1,48	49%	Capaian kinerja belum mencapai target dalam RPA karena masih minimnya destinasi wisata unggulan di Aceh dan belum maksimalnya pelaksanaan promosi. (Sumber Data : BPS)
6	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata	Orang	121.147	158.802	131%	Capaian kinerja melebihi target dalam RPA (Sumber Data : BPS)

Sumber : Realisasi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2023-2026

Banda Aceh, 19 Januari 2026
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
ACEH

DEDY YUSWADI, A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19770328 199603 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dipercayakan untuk mengelola dana sebesar Rp 91.575.614.095,30 dan terealisasi sebesar Rp 90.598.066.496,62 atau sebesar 98,93%. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2025 ditetapkan melalui perjanjian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 2023-2026. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 menunjukan bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang tingkat capaian indikatonya tidak mencapai target sesuai rencana yaitu indikator Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB sebesar 95,56%, Rasio Pelestarian Cagar Budaya sebesar 88%, Rasio Jumlah Pengunjung Museum sebesar 92% dan indikator Lama Kunjungan Wisatawan sebesar 49%, sedangkan pencapaian sasaran lainnya melebihi Tingkat capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat terlaksana dengan baik dalam pencapaian sasaran strategis didukung oleh kesadaran kabupaten/kota dalam melindungi warisan budaya tak bendanya dan terbangunnya sinergitas antara pemerintah Aceh dan UPTD Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Promosi yang dilakukan oleh Disbudpar Aceh melalui slogan “Lestarikan Budaya Majukan Pariwisata”, semakin baiknya daya tarik pariwisata (Atraksi), semakin meningkatnya fasilitas akomodasi yang tersedia (Amenitas) serta kualitas sarana dan prasarana transportasi yang semakin baik (Aksebilitas). Hal ini merupakan faktor pendukung dalam peningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh di sektor kebudayaan dan pariwisata di tahun depan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR ..... **i**

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

Latar Belakang 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 2

Struktur Organisasi 3

Sumber Daya Manusia 4

Sarana dan Prasarana 6

Keuangan 7

Permasalahan Utama 7

Isu Strategis (*StrategicIssued*) 13

Sistematika Penyajian Laporan 17

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA **18**

Rencana Strategis 18

Tujuan, Sasaran dan Kebijakan 18

Strategi dan Arah kebijakan 21

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 23

Perjanjian Kinerja 24

Rencana Anggaran Tahun 2025 25

Alokasi Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 26

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 26

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA **31**

Pengukuran Capaian Kinerja 32

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 31

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir 33

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis 34

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Capaian Nasional 36

Prestasi/Penghargaan 37

Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan serta rencana kebijakan kedepan 38
Terlestarikannya Cagar Budaya 39
Rasio Jumlah Pengunjung Museum 40
Kunjungan Wisatawan..... 40
Lama Kunjungan Wisatawan 42
Kontribusi Sektor Pariwisata..... 42
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata..... 44
Analisis efesiensi atas penggunaan sumber daya 45
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja..... 46
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 47
Analisa Efisiensi..... 53
Kendala dan Solusi..... 55

BAB 4 PENUTUP 59
Kesimpulan..... 59
Rencana Tindak Lanjut..... 59

LAMPIRAN

Rencana Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2023 s.d 2026
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2025
Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Realisasi Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2025
Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah atas penggunaaan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penilaian dan pelaporan kinerja dalam rangka menjamin pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, professional, efisien dan efektif, transparan, menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja juga menjadi sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Melalui langkah ini setiap SKPA dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelengggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah menyusun Laporan Kinerja sebagai sarana akuntabilitas untuk mengukur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan dinas dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai visi, misi serta tujuan dan sasaran kerja sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2023-2026, dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025 diharapkan dapat :

a. Memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
b. Memberitahukan kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan beserta hasil evaluasinya;
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk meningkatkan kinerjanya;
d. Sebagai salah satu kewajiban bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

mencapai misi organisasi.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berkedudukan dibawah Pemerintah Aceh dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah. Dalam mengemban tugas pada urusan pembangunan kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berupaya melindungi, memanfaatkan dan melestarikan budaya serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan khasanah kebudayaan dan warisan budaya di daerah Aceh. Disisi lain menumbuhkan pemahaman masyarakat akan sadar wisata, penataan destinasi wisata dan objek pembangunan pariwisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan, memperkenalkan pariwisata Aceh secara luas serta memelaksanakan pengelolaan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif juga menjadi tugas penting dinas kebudayaan dan pariwisata dalam memajukan pariwisata daerah.

Demi mencapai maksud dan tujuan tersebut, berbagai Program/Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan memperhatikan aspek pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami serta potensinya sebagai sumber daya industri yang dapat mendorong ekonomi masyarakat.

Adapun tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata secara Islami sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

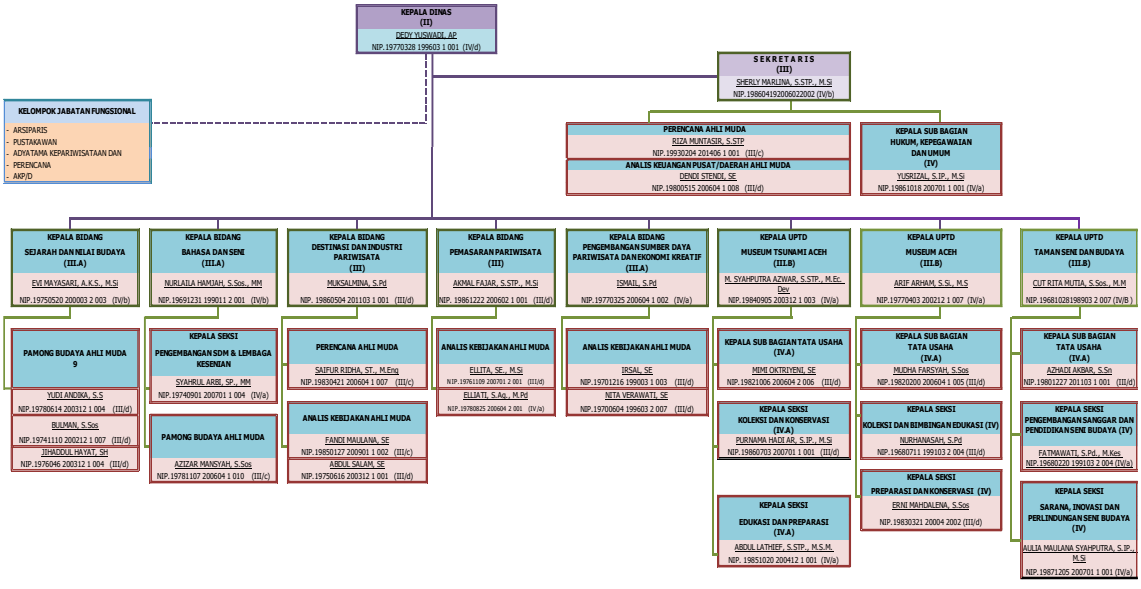
1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di daerah;
4. Pembinaan teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota;
5. Pemberian Rekomendasi perizinan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);dan
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di

bidang kebudayaan dan pariwisata.

Kewenangan kebudayaan berorientasi pada 3 (tiga) kebijakan utama yakni: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pada seni budaya, sejarah purbakala dan benda cagar budaya. Sedangkan kewenangan pariwisata di level Provinsi Aceh memberikan arahan dan kebijakan bahwa pembangunan pariwisata meliputi 4 (empat) cakupan komponen yaitu: 1) Destinasi Pariwisata, berkaitan dengan pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, pembangunan fasilitas umum, pembangunan pariwisata serta pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan; 2) Pemasaran Pariwisata, berkaitan dengan pemasaran pariwisata bersama terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing; 3) Industri Pariwisata, berkaitan dengan pembangunan struktur (fungsi, hirarki, hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan 4) Kelembagaan Kepariwisataan, berkaitan dengan pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1
Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memiliki 174 (seratus tujuh puluh empat) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain PNS, terdapat juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang berjumlah 86 (delapan puluh enam) orang. Selain PNS dan PPPK, terdapat juga pegawai kontrak yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang. Semua pegawai ditempatkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan juga UPTD yang berada di bawah pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Adapun rincian pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	SATUAN KERJA / BIDANG	L	P	JUMLAH
1	Sekretariat	44	24	68
2	Sejarah dan Nilai Budaya	10	8	18
3	Bahasa dan Seni	7	4	11
4	Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	7	2	9
5	Pemasaran	4	3	7
6	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7	5	12
7	UPTD Museum Tsunami Aceh	37	18	55
8	UPTD Museum Aceh	26	19	45
9	UPTD Taman Seni dan Budaya	12	7	19
10	Jabatan Fungsional Tertentu	4	6	10
Jumlah		**158**	**96**	**254**
11	Tenaga Kontrak			
	a. Administrasi	11	7	18
	b. Tenaga Teknis			
	i. Teknisi	-	-	-
	c. Penunjang			
	i. Petugas Keamanan	7	-	7
	ii. Pramu Kebersihan	7	-	7
Jumlah		**25**	**7**	**32**
Total		**183**	**103**	**286**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata – Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada pegawai tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sudah mencapai 38,43 % yang berstatus pengawai negeri sipil. Jumlah tersebut sudah dapat memenuhi target MDGs

sebesar 33% terhadap kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan. Jenjang kepangkatan merupakan hal penting dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Tujuan kepangkatan adalah untuk memenuhi jenjang karir dalam menjalankan roda kepemimpinan lembaga. Rincian jenjang kepangkatan pegawai dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

NO.	SATUAN KERJA / BIDANG	PANGKAT			
		I	II	III	IV
1	Sekretariat	-	5	26	5
2	Sejarah dan Nilai Budaya	-	3	14	1
3	Bahasa dan Seni	-	1	8	2
4	Pengembangan Destinasi	-	-	6	3
5	Pemasaran	-	-	6	1
6	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan	-	-	9	2
7	UPTD Museum Tsunami Aceh	-	6	7	3
8	UPTD Museum Aceh	-	10	22	2
9	UPTD Taman Seni dan Budaya	-	2	12	3
10	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	9	1
Jumlah		**-**	**27**	**119**	**23**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata – Desember 2025

Dilihat dari kepangkatan pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, maka golongan III lebih mendominasi jenjang kepangkatan lainnya. Jenjang kepangkatan golongan IV berjumlah 23 orang, golongan III berjumlah 119 orang, golongan II berjumlah 27 orang, dan golongan I berjumlah 0 orang.

Jenjang pendidikan pegawai merupakan indikator yang perlu mendapat perhatian dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Adapun gambaran tentang jenjang pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH	Persentase (%)
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-
3	SLTA	29	4	33	23%

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH	Persentase (%)
4	D-I	-	-	-	-
5	D-II	-	-	-	-
6	D-III	5	4	9	6%
7	D-IV	3	-	3	2%
8	S1	34	33	67	47%
9	S2	19	9	28	19%
10	S3	1	-	1	1%
Jumlah		**91**	**50**	**141**	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata – Desember 2025

Jenjang pendidikan PNS dan tenaga kontrak berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan didominasi jenjang pendidikan S1 sebanyak 44%. Berikutnya adalah jenjang pendidikan SLTA 33%, S2 11% dan D-IV sebanyak 2% dan D3 sebanyak 10%. Pendidikan seseorang dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh merupakan hal yang sangat penting dimiliki.

Secara umum, dari gambaran tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sudah mencukupi ditambah lagi dengan pengalaman dan pelatihan-pelatihan akan semakin memperkuat posisi dari masing-masing pegawai. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tenaga ahli dari perguruan tinggi dan juga menjalin kerjasama lintas sektoral dalam memperkuat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi instansi.

E. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, sarana dan prasarana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang dimiliki dapat dilihat pada data rekapitulasi aset pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tabel 1.4 berikut ini.

Tabel 1.4

Rekapitulasi Aset pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

AKUN	KELOMPOK	JENIS	URAIAN	JUMLAH UNIT	NILAI (Rp.)	KET
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	***3***		***Aset Tetap***	**24,706**	**506.585.747.215,16**	
1	3	1	Tanah	17	107.495.107.921,00	
1	3	2	Peralatan Dan Mesin	4.771	63.923.529.899,62	

1	3	3	Gedung Dan Bangunan	350	302.871.252.238,98	
1	3	4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	171	11.551.242.500,42	
1	3	5	Aset Tetap Lainnya	19,379	18.993.117.053,00	
1	3	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	18	1.751.497.602,14	
1	**5**		***Aset Lainnya***	**514**	**36.655.946.763,69**	
1	5	3	Aset Tidak Berwujud	14	1.563.638.822,84	
1	5	4	Aset Lain-Lain	500	35.092.307.940,85	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata – Desember 2025

F. KEUANGAN

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memperoleh alokasi anggaran dari APBA sebagaimana tertera pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5

Anggaran dan Proporsi Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025

BELANJA DAERAH		APBA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	APBA PERUBAHAN (Rp)	% DARI TOTAL ANGGARAN
BELANJA OPERASI		**51.512.432.033,00**	**65.295.314.254,30**	+19,13
5.1.01	Belanja Pegawai	21.059.548.885,00	23.946.844.012,00	+4,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.452.883.148,00	41.348.470.242,30	+15,13
BELANJA MODAL		**20.518.804.750,00**	**26.280.299.841,00**	+7,99
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.271.428.750,00	19.933.391.841,00	+9,25
5.2.03	Belanja modal Gedung dan Bangunan	7.235.424.000,00	505.000.000,00	-9,34
5.2.04	Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	832.944.000,00	+1,16
5.2.05	Belanja modal Aset Tetap Lainnya	11.952.000,00	5.008.964.000,00	+6,94
JUMLAH BELANJA		**72.031.236.783**	**91.575.614.095,30**	+27,13

Sumber : DPA – SKPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025

G. PERMASALAHAN UTAMA

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, diantaranya:

1. Semakin memudarnya ciri kehidupan budaya masyarakat Aceh karena kuatnya pengaruh budaya luar sehingga berdampak pada semakin rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal, termasuk di dalamnya:
    a. berkurangnya penutur bahasa ibu atau ragam bahasa asli daerah di Aceh;
    b. terbatasnya keterjangkauan pemerintah atas penguatan kesenian maupun wujud warisan budaya lainnya yang memiliki nilai kesejarahan dan kebudayaan yang tinggi;
    c. kehidupan sosial kemasyarakatan serta silaturahmi yang tidak lagi arif berpegang pada keistimewaan nilai adat dan norma kebudayaan Aceh; serta;
    d. semakin langkanya tauladan kepemimpinan maupun kelola kelembagaan yang selaras dengan keistimewaan Aceh sebagai sebuah peradaban yang islami, damai serta mensejahterakan umat.
    e. Kesadaran masyarakat untuk menjaga, memelihara dan melestarikan budaya masih rendah sehingga wujud cagar budaya yang berupa benda dan kawasan bisa hilang tergerus waktu berganti dengan benda masa kini yang meninggalkan jejak sejarah peradaban masa lalu Aceh;
2. Terbatasnya sumber daya manusia kreatif dalam mengisi kebutuhan yang semakin meningkat untuk upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh, baik untuk kualifikasi peneliti dan pendidik bidang kebudayaan dalam upaya perlindungannya, serta penyaji, pencipta dan pengelola dalam upaya pelestarian dan kreatifitas pengembangan industri kepariwisataan berbasis budaya; yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni serta teknologi termutakhir.

Selain permasalahan utama secara umum pada bidang kebudayaan dan kepariwisataan, pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi dalam evaluasi pelaksanaan tupoksi, yaitu:

1. Proses pembelajaran sejarah dan kehidupan kebudayaan Aceh tidak terkawal secara tepat dan merata, baik melalui lembaga/institusi pendidikan formal atau nonformal lintas jenjang usia di Aceh, maupun melalui pemanfaatan program dan kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swadaya masyarakat, atas wawasan pengetahuan, keilmuan dan keterampilan yang berorientasi pada keistimewaan sejarah serta kekayaan dan keragaman budaya di Aceh. Pesatnya arus informasi global dalam berbagai wujud, isi dan

medianya adalah faktor lainnya yang juga memberi pengaruh terhadap persepsi dan ketahanan budaya masyarakat di Aceh, baik dalam kesehariannya berbahasa, gaya hidup, berkesenian, hingga dalam saat memilih profesi/pekerjaan sebagai sumber mata pencahariannya;

2. Masih kurangnya minat masyarakat serta dorongan pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia kreatif bidang kebudayaan dan pariwisata dan belum optimalnya sistematika perencanaan yang bersifat strategis dan berkesinambungan. Hal ini juga dipengaruhi oleh lemahnya daya pengetahuan masyarakat umumnya oleh keterbatasan keterjangkauan informasi serta pengetahuan atas perkembangan keilmuan, keahlian dan keterampilan bidang budaya dan pariwisata, termasuk yang terfasilitasi dalam pembelajaran kependidikan formal maupun informal. Disisi lain, keterbatasan peluang dan intensitas keikutsertaan para pelaku budaya maupun pelaku industri pariwisata yang terkait dengan pengembangan keahlian dan karier dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, baik dalam lingkup global, nasional dan bahkan internasional adalah faktor lainnya yang menghambat berkembangnya sumber daya manusia kreatif untuk mampu mengisi kebutuhan yang semakin meningkat, baik untuk upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh maupun tuntutan kreatifitas tata kelola pariwisata yang menuntut kreatifitas serta daya inovasi yang tinggi;
3. Dalam hal fasilitas, baik sarana maupun prasarana penunjang industri pariwisata berbasis budaya selain permasalahan dana, faktor yang mempengaruhi lainnya adalah masih lemahnya daya keberlanjutan (*sustainable*) atas perencanaan yang disiapkan, termasuk pemeliharaannya serta pengembangannya. Fasilitas industri pariwisata, baik yang berbasis alam (*nature*), budaya (*culture*) dan buatan manusia (*Man Made*), tidak hanya diharapkan komprehensif untuk mengantisipasi kebutuhan konsep dan implementasi kepariwisataan yang terus berkembang, baik dari segi fungsi dan intensitas pemanfaatannya;
4. Belum optimalnya kerjasama dan sinergistas kerja tata kelola budaya dan kepariwisataan, baik antar satuan kerja perangkat daerah lintas bidang maupun kedinasan serta dengan para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata secara luas baik dalam skala kerja daerah tingkat I maupun tingkat II maupun dengan masyarakat wisata dan pemerintahan provinsi lainnya di

Indonesia. Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat wisata dan pemerintah negara-negara internasional. Optimalisasi kerjasama kelola budaya dan wisata ini kiranya akan berdampak signifikan dalam capaian perluasan pasar pariwisata, termasuk potensi penggalangan investasi kepariwisataan yang menguntungkan sekaligus berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan pada prioritas dan sasaran pembangunan Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 1.6 di bawah ini :

Tabel 1.6

Permasalahan-permasalahan pada prioritas dan sasaran pembangunan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Semakin memudarnya ciri kehidupan budaya masyarakat Aceh dan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	i. Berkurangnya penutur bahasa ibu atau ragam bahasa asli daerah di Aceh; ii. Terbatasnya keterjangkauan pemerintah atas penguatan kesenian maupun wujud warisan budaya lainnya yang memiliki nilai kesejarahan dan kebudayaan; iii. Kehidupan sosial kemasyarakatan serta silaturahmi yang tidak lagi arif berpegang pada keistimewaan nilai adat dan norma kebudayaan Aceh; serta iv. Semakin langkanya tauladan kepemimpinan maupun kelola kelembagaan yang selaras dengan keistimewaan Aceh sebagai sebuah peradaban yang Islami, damai serta mensejahterakan umat.	Dari sisi masyarakat, ketahanan terhadap bahasa sebagai identitas diri tergerus arus globalisasi/modernisasi. Dari sisi pemerintah, pemerintah belum menemukan formula yang tepat untuk menahan arus globalisasi/modernisasi.
2	Terbatasnya sumber daya manusia kreatif dalam mengisi kebutuhan yang semakin meningkat untuk upaya perlindungan dan pelestarian	i. Sedikitnya hasil-hasil penelitian terkait penggalian potensi sumber daya budaya serta pengembangan industri kepariwisataan di Aceh; ii. Ketersediaan perangkat pembelajaran bidang	Terbatasnya dukungan atas kegiatan-kegiatan eksplorasi kebudayaan serta peningkatan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni serta

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kebudayaan secara menyeluruh,	kebudayaan dan pariwisata untuk segala jenjang pendidikan formal di Aceh masih belum memadai, mulai dari tenaga pendidik, kurikulum hingga sumber dan media pembelajarannya. iii. Belum terlindunginya aset-aset kebudayaan yang potensial untuk dijadikan sumber pengembangan industri pariwisata. iv. Kurangnya sumber daya penyaji, pencipta dan pengelola terlatih untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya pelestarian dan kreatifitas pengembangan industri kepariwisataan.	teknologi termutakhir di dalam bidang kebudayaan dan pariwisata.
3	Kurangnya fasilitas, baik sarana maupun prasarana penunjang industri pariwisata berbasis budaya, secara kualitas maupun kuantitas, termasuk pemanfaatan sumber daya budaya yang telah ada dan terlacak untuk kemudian dapat terus dikembangkan sebagai potensi pengembangan kepariwisataan yang lebih unggul dalam persaingan industri pariwisata dunia.	i. Rendahnya nilai jual sebagian aset kepariwisataan di Aceh. ii. Lemahnya efektivitas daya promosi atas nilai dari ragam potensi destinasi wisata di Aceh yang mampu meningkatkan kunjungan wisnus dan wisman. iii. Jumlah pilihan destinasi (*Marine Tourism, Eco Tourism, Adventure Tourism, Heritage and Pilgirm Tourism, Culinary and Shopping Tourism, City and Village Tourism, Mice and Event Tourism, Sport Tourism, and Integrated Area Tourism*) yang belum berimbang dengan target optimalisasi kunjungan wisnus dan wisman. iv. Lemahnya daya kompetisi pemanfaatan teknologi informasi yang terus tumbuh dan berkembang menjangkau segala aspek yang dibutuhkan bagi promosi kepariwisataan	Perencanaan dan perancangan sarana/ prasarana belum berkelanjutan(*sustainable*) serta penganggaran yang belum optimal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		v. Kurangnya sarana akomodasi dan transportasi yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan masa tinggal wisatawan di Aceh.	
4	Kurangnya kerjasama dan sinergisitas kerja tata kelola budaya dan kepariwisataan, baik antar satuan kerja perangkat daerah lintas bidang maupun kedinasan serta dengan para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata secara luas.	i. Data-data tidak terintegrasi dengan pengelolaan yang akurat, baik dan benar. ii. Pembangunan infrastruktur pariwisata tidak utuh dan menyeluruh. iii. Pengembangan program-program kepariwisataan yang tidak mengikuti pesatnya perkembangan pariwisata dunia. iv. Minimnya investasi di bidang kebudayaan dan kepariwisataan	Rendahnya kompetensi sumber daya manusia pengelola kepariwisataan.
5	Kemudahan investasi bagi calon investor di bidang pariwisata masih berbelit-belit	Sistem birokrasi yang belum efektif dan efisien dalam melayani perizinan investasi	Rendahnya kompetensi SDM regulasi yang tumpeng tindih
6	Isu pandemic covid saat ini telah berlalu, namun daya saing pariwisata Aceh masih rendah	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan	Terbatasnya daya tarik destinasi pariwisata unggulan dan belum didukung aksesibilitas dan amenitas yang memadai
7	Kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi	Masih rendahnya kualitas, kreatifitas dan produktifitas SDM	Belum adanya sinkronisasi yang harmonis program dan kegiatan dalam Upaya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2023-2026

Berpedoman pada identifikasi pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka prioritas dan sasaran pembangunan Aceh di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
2. Peningkatan sistem informasi terintegrasi yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, industri budaya, dan kepariwisataan.
3. Pembangunan destinasi pariwisata halal yang berkelanjutan berbasis keislaman, budaya, sejarah, alam dan mitigasi bencana;
4. Pembangunan industri pariwisata halal dan berstandar internasional yang

mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah;

5. Pembangunan citra destinasi pariwisata halal yang ramah wisatawan untuk pasar wisatawan yang lebih luas.
6. Membangun SDM pariwisata Aceh yang berkompetensi internasional didukung kelembagaan yang andal.

H. ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, maka peran sebagai regulator merupakan tantangan utama yang perlu disikapi untuk pengembangan Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan Aceh. Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, diantaranya:

1. **Belum optimalnya pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan clean government**

   Untuk peningkatan pelayanan publik yang belum optimal, diperlukan peningkatan sumber daya manusia serta menempatkan SDM sesuai dengan jenjang pendidikannya atau sesuai dengan keahliannya dan didukung dengan peningkatan pelayanan melalui sistem elektronik terpadu.

2. **Belum optimalnya pengelolaan peninggalan sejarah kepurbakalaan dan budaya lokal**

   Pengelolaan peninggalan sejarah kepurbakalaan dan budaya lokal belum dikelola dengan profesional. Perlu penanganan lebih dengan menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Harapannya mampu mendongkrak sejarah kepurbakalaan dan budaya lokal yang selama ini belum tergali dengan mendalam.

3. **Implementasi konsep wisata halal di Aceh**

   Konsep wisata halal perlu diperkuat dengan melakukan studi mendalam dan terukur agar menemukan konsep yang tepat bagi perkembangan wisata Aceh yang berada dalam koridor syariat Islam. Untuk mengaplikasikan wisata halal tidak mudah namun konsep ini dianggap sesuai dan mulai diterima ditengah-tengah persaingan wisata global yang cukup ketat. Kekhasan dan keunikan wisata kita yang memiliki kekayaan seni, adat dan budaya Aceh yang bernafaskan Islam diharapkan mampu menciptakan konsep wisata halal

tersendiri, dengan demikian Aceh mampu memberikan sajian yang lain bagi industri wisata dunia.

4. **Perbedaan persepsi/cara pandang terhadap wisata antara pemerintah dan masyarakat**

   Menyatukan persepsi antara prinsip-prinsip syariat Islam di Aceh dan wisata masih menemukan kendala-kendala di lapangan yang tak jarang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Persepsi dan komitmen bersama untuk memajukan pariwisata Aceh melalui prinsip yang berpihak terhadap syariat Islam, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan sangat penting diwujudkan. Harapannya pengembangan wisata Aceh akan memiliki arah dan sasaran sesuai harapan bersama yang berdampak positif.

5. **Pemenuhan Standard Pelayanan Dan Pengelolaan Industri Pariwisata**

   Standar pelayanan dan pengelolaan industri pariwisata perlu dibenahi sesuai dengan harapan dan kebutuhan wisatawan menuju pengelolaan pariwisata secara profesional dan berstandar Internasional. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional sangat diperlukan dalam rangka menghadapi persaingan global di industri pariwisata.

6. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Aksesibilitas Dan Amenitas Pariwisata**

   Kualitas pelayanan aksesibilitas dan amenitas pariwisata merupakan salah satu satu pilar dalam keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Kualitas pelayanan yang telah terstandarisasi bahkan sampai tingkat internasional perlu dicapai untuk memberikan performa terbaik dalam kepariwisataan Aceh.

7. **Isu-Isu Negatif Tentang Keamanan Dan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh**

   Isu-isu negatif yang berkembang diluar Aceh tentang keamanan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah berdampak pada kesalahpahaman atau "*missunderstanding*" tentang pelaksanaan syariat Islam yang sebenarnya. Kesalahpahaman ini juga telah berdampak pada minat para investor untuk melakukan kegiatan investasi di Aceh. Upaya-upaya strategis dalam rangka meyakinkan para investor untuk melakukan kegiatan investasi di Aceh perlu

didorong dengan melibatkan semua pihak, sekaligus memberikan berbagai kemudahan dan insentif kepada investor untuk bersedia melakukan kegiatan investasi di Aceh dengan penuh keyakinan dan percaya diri.

8. **Literasi Wawasan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Masih Lemah**

   Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan sebagai identitas Keacehan. Indikator kemampuan literasi budaya dan kewargaan terdiri dari beberapa Indikator yaitu memahami kompleksitas budaya, mengetahui budaya sendiri, dan kepedulian terhadap budaya.

9. **Minim Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kebudayaan baik secara Kuantitas dan Kualitas**

   Salah satu upaya untuk melakukan pelestarian terhadap kebudayaan yaitu dengan menyediakan SDM yang baik secara kualitas maupun kuantitas. Upaya Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas pelaku, lembaga, dan pranata kebudayaan. Tindak-tindak pembinaan bagi pemajuan kebudayaan diatur pada Pasal 39 dan 40 dalam UU Pemajuan Kebudayaa No 5 Tahun 2017.

10. **Sinergisitas antar Pemerintah Pusat, Daerah dan Komunitas masih belum maksimal terhadap Upaya Pelestarian Kebudayaan**

    Merujuk kepada Indeks Pemajuan Kebudayaan Nasional (IPK) ada 7 Dimensi Kebudayaan dengan 30 Indikator Capaian yang beririsan dengan SKPA lain. Dimensi Tersebut adalah Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Untuk mencapai IPK tersebut disbudpar harus berkolabarasi dengan Pemerintah Pusat, Daerah dan Komunitas. Kebudayaan sebagai Hulu dalam upaya pelestarian Objek-objek budaya membutuhkan hilirasasi oleh seluruh SKPA. Setiap SKPA dapat menggunakan Produk-produk Budaya Aceh untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

11. **Penyelenggaraan Kebudayaan Aceh Belum Memiliki Payung Hukum yang Relevan dengan UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan**

    Meski Aceh telah memiliki Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh namun seiring dengan

perkembangan Zaman ternyata banyak hal yang belum terlindungi dalam Qanun ini. Oleh Karenanya dipandang perlu untuk menyusun Qanun baru yang menyesuaikan dengan Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Nasional tanpa melupakan Ke Khususan Aceh lewat UUPA No 11 Tahun 2006. Rancangan Qanun (Raqan) Pemajuan Kebudayaan telah disusun oleh Disbudpar sejak tahun 2022 adalah salah satu upaya untuk menjawab seluruh permasalahan Upaya Pelestarian Kebudayaan di Provinsi Aceh. Seperti Literasi Kebudayaan Aceh, SDM Kebudayaan Aceh dan Pranata-pranatanya dan lain sebagainya. Dan diharapkan di tahun 2025 ini Raqan Pemajuan Kebudayaan Aceh dapat masuk ke Prolega Prioritas bukan tambahan di tahun ini.

I. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan secara singkat profil/gambaran umum mengenai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama dan isu strategis *(strategic issued)* yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2023.

BAB III KUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 2023-2026 adalah salah satu dokumen rencana resmi daerah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dinas selama 4 tahun. Rencana strategis disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Aceh (RPA). Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat Aceh melalui pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2023-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah dalam menjalankan kebijakan Strategis pemerintah Aceh yang merupakan implementasi RPA Tahun 2013-2026, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Isi dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menjabarkan tentang kebijakan yang dilakukan secara komprehensif dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode 4 (empat) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika tuntutan perubahan dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah Aceh khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya selama periode lima tahun ke depan.

B. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Aceh tahun 2023 – 2026 serta rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menetapkan tujuan sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam periode waktu 2023 – 2026 yaitu:

a. Tujuan

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,

kemandirian fiskal daerah dan ketahanan pangan untuk mengurangi dampak sosial ekonomi pasca pandemi covid-19.

b. Sasaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menetapkan sasaran strategis sebagai turunan dari setiap tujuan strategis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 2023-2026, yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik;
2. Meningkatkan Sub Kontribusi PDRB Pariwisata.

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2023–2026, secara konsisten diarahkan pada upaya–upaya mendukung lingkup tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan Aceh dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Berkenaan dengan hal tersebut, sinkronisasinya dapat terlihat pada matrik hubungan dimaksud sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2023 s/d 2026			
				Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	95%	95%	95%	95%
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam Upaya Mengurangi Dampak Pasca Pandemi Covid-19.	Meningkatkan Sub Kontribusi PDRB Pariwisata.	Konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,29%	1,8%	1,9%	2%

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2023-2026

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berdasarkan tujuan dan sasaran diatas dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

Matriks Hubungan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.	Meningkatkan Sub Kontribusi PDRB Pariwisata.	**KEBUDAYAAN**	**KEBUDAYAAN**
		1 Memperkuat kemitraan strategi dengan stakeholder kebudayaan	1 Memperkuat kemitraan strategi dengan stakeholder kebudayaan dengan melibatkan ABCG
		2 Mengembangkan wisata kreatif berbasis 9 etnik/suku	2 Pembinaan kelompok penulis/peneliti dan penutur Bahasa dan kesusastraan 9 etnik/suku untuk menambah daya tarik wisata seni dan budaya tradisional Aceh
		3 Mengembangkan wisata kreatif dan edukatif	3 Peningkatan kreatifitas dan inovasi karya seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal
		4 Pelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya	4 Pembangunan dan peningkatan fasilitas museum, situs dan cagar budaya dalam penciptaan fungsi-fungsi baru pelayanan kebudayaan sebagai upaya peningkatan kunjungan wisatawan
		5 Mengembangkan	5 Pembinaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		industri peralatan tradisional khas Aceh berkualitas	industri peralatan tradisional khas Aceh dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peluang berusaha
		PARIWISATA	**PARIWISATA**
		1 Pengembangan Destinasi Pariwisata yang sinergi berdasarkan perwilayahan antara KSPA dengan KSPN yang berada di Aceh	1 Penguatan sinergisitas pengembangan Destinasi Pariwisata Aceh dengan perwilayahan Pariwisata Nasional dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi
		2 Mengembangkan produk dan pelayanan Pariwisata Halal berkualitas	2 Pembinaan dan Pengembangan produk dan pelayanan Pariwisata Halal berkualitas pada Daya Tarik Wisata unggulan dengan prinsip pengelolaan Pariwisata berstandar Internasional, dan penerapan standar mitigasi bencana dan bahaya kesehatan
		3 Mengembangkan Teknologi layanan pariwisata berbasis industri 4.0 dan Peningkatan SDM Pariwisata yang kompeten	3 Penyediaan Sistem Informasi dan Promosi Wisata Berbasis Industri 4.0 dan fasilitas sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata bertaraf nasional dan internasional

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		4 Menguatkan branding *'The Light of Aceh"* atau "Cahaya Aceh	4 Peningkatan Promosi Pariwisata Aceh dengan pelaksanaan Event dan partisipasi pada Event Nasional dan Internasional untuk penguatan Branding "The Light of Aceh" dan Kunjungan Wisata
		5 Pemulihan usaha ekonomi kreatif pariwisata pasca pandemi covid 19	5 Pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif pariwisata

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2023-2026

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 2023-2026 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk mencapainya dalam tahun 2025. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kinerja Tahunan ini disebut Rencana Kerja SKPD disingkat Renja SKPD. Dokumen rencana kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025 memuat informasi tentang:

a) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
b) Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya;
c) Program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Adapun rencana kerja tahunan berdasarkan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran I Laporan Kinerja (LkiJ) ini.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Tujuan Perjanjian Kinerja:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumberdaya;
3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
5. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
6. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
7. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
8. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) atau sanksi (*Punishment).*

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN / STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata	1	Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	1,9 %
	2	Jumlah rasio pelestarian cagar budaya	28,39 %
	3	Jumlah rasio pengunjung museum	130,9
	4	Jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh	2.836.869 orang
	5	Jumlah Lama Kunjungan Wisatawan ke Aceh	3 hari

	6	Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata	121.147 orang

Program	Anggaran (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.685.009.409,02
Program Pengembangan Kebudayaan	5.978.466.492,70
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	836.146.308,00
Program Pembinaan Sejarah	807.622.267,80
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	10.245.809.162,00
Program Pengelolaan Permuseuman	21.696.044.511,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.925.232.094,09
Program Pemasaran Pariwisata	10.692.040.743.85
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	52.542.442,10
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	656.700.664,74

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025

F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melaksanakan kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai tersebut pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4

Alokasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025

URAIAN	PAGU
Pagu Sesuai KUA PPAS	Rp72.031.236.783,00
Pagu Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Rp72.031.236.783,00
Pagu Perubahan	Rp96.247.744.095,30
Pagu Perubahan Pergeseran I	Rp91.873.534.095,30
Pagu Perubahan Pergeseran II	RP91.575.614.095,30

Sumber : DPA-SKPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025

Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwsata Aceh pada awalnya adalah sebesar Rp 72.031.236.783 dan mengalami perubahan anggaran sebanyak 3 kali pada tahun 2025 sehingga berubah menjadi Rp 91.575.614.095,30 atau bertambah sebesar 27,13% dari total anggaran awal dengan rincian perbelanjaan untuk belanja operasi sebesar Rp65.295.314.254,30 dan belanja

modal sebesar Rp 26.280.299.841,00.

a. Alokasi Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025 berdasarkan belanja operasional dan belanja modal anggaran dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Alokasi Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025

Uraian	Target	Persentase Alokasi Anggaran (%)
Belanja Operasi	65.295.314.254,30	71,30
Belanja Modal	26.280.299.841,00	28,70
Jumlah	91.575.614.095,30	100

Sumber : DPA-SKPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, terlihat bahwa alokasi anggaran untuk belanja operasional sebesar Rp65.295.314.254,30 atau sebesar 71,30% dari total anggaran, sedangkan sisanya sebesar Rp26.280.299.841,00 atau sebesar 28,70% dialokasikan untuk belanja modal.

b. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.6
Alokasi Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase (%)
1	1. Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Teknik pengelolaan Adminstrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.685.009.409,02	34,60

No	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase (%)
	Keuangan; serta Pengelolaan Inventarisir Aset 3. Meningkatnya Pengendalian Teknis Urusan Ketatausahaan, Rumah Tanggam Barang Inventaris, Perlengkapan, Peralatan, Pemeliharaan dan Perpustakaan			
2	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya Aceh 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya 3. Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	5.978.466.492,7	6,53
3	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 2. Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kesenian, dan Pranata Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	836.146.308,00	0,91

No	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase (%)
	3. Meningkatnya Pelestarian Bahasa Daerah			
4	1. Meningkatnya Upaya Pemajuan Kebudayaan Aceh melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2. Tersedianya Literasi Kajian Sejarah 3. Meningkatnya Pemugaran Cagar Budaya	Program Pembinaan Sejarah	807.622.267,8	0,88
5	1. Meningkatnya Upaya Pemajuan Kebudayaan Aceh melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2. Tersedianya Literasi Kajian Sejarah 3. Meningkatnya Pemugaran Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	10.245.809.162,00	11,19
6	1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Museum Tsunami Aceh 2. Meningkatnya PAD Museum Tsunami Aceh	Program Pengelolaan Permuseuman	21.696.044.511	23,69

No	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase (%)
7	1. Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 2. Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 3. Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi 4. Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.925.232.094,09	9,75
8	1. Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Aceh 2. Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Aceh	Program Pemasaran Pariwisata	10.692.040.743,85	11,68
9	1. Meningkatnya Investasi Pariwisata Aceh 2. Menigkatnya Hubungan Dengan Asosiasi Pariwisata 3. Terfasilitasinya Sertifikasi	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	52.542.442,10	0.06

No	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase (%)
	Kompetensi bagi tenaga Kerja Bidang Pariwisata 4. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
10	1. Meningkatnya Investasi Pariwisata Aceh 2. Menigkatnya Hubungan Dengan Asosiasi Pariwisata 3. Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga Kerja Bidang Pariwisata 4. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	656.700.664,74	0.72

Sumber : DPA-SKPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yaitu terwujudnya pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang proporsional dan professional. Pengembangan sektor kebudayaan merupakan upaya dalam rangka melestarikan berbagai warisan budaya benda dan tak benda. Pengembangan kebudayaan

diharapkan dapat bersinergi dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap perekonomian Aceh dari sektor pariwisata.

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2025

(Perjanjian Kinerja Kepala Dinas)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA/ KODE
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	1,8%	1,76	93%	Sangat Baik
		Rasio pelestarian cagar budaya	28,39 %	24,85	88%	Tinggi
		Rasio pengunjung museum	130,9	120,26	92%	Sangat Baik
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.836.869	18.345.784	647%	Sangat Baik
		Lama Kunjungan Wisatawan	3 Hari	1,48	49%	Sangat Rendah
		Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata	121.147 orang	158.802	131%	Sangat Baik

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata telah melebihi target realisasi yang diharapkan yaitu masing-masing sebesar 647% dan 131%, sedangkan realisasi tingkat capaian indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (93%), Rasio pelestarian cagar budaya (88%), Rasio pengunjung museum (92%) dan Lama Kunjungan Wisatawan (49%) belum mencapai target

realisasi yang diharapkan.

Ketidaktercapaian target indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB disebabkan karena data yang diambil masih data triwulan III tahun 2025, sedangkan data Bulan Desember belum di rilis oleh BPS. Tingkat capaian Rasio Jumlah Pengunjung Museum yang lebih rendah disebabkan karena adanya proses rehabiltasi Gedung Museum Tsunami tahun ini sehingga tidak maksimalnya jam operasional Museum Tsunami. Adapun belum tercapainya target Rasio pelestarian cagar budaya lebih karena adanya pengurangan juru pelihara di Lokasi cagar budaya akibat dari keterbatasan anggaran. Rendahnya capaian Lama kunjungan wisatawan lebih disebabkan karena daya saing destinasi pariwisata Aceh di kancah dunia, yang salah satu penyebabnya adalah terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan yang memadai, amenitas yang terbatas dan aksebilitas ke lokasi wisata yang masih sulit dicapai.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja kebudayaan dan pariwisata yang telah dicapai pada tahun 2025, dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3

Perbandingan Kinerja Disbudpar Aceh dari Tahun 2022 s.d Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		2023	2024	2025
Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata	1.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,77	1,72	1,76
	2.	Rasio pelestarian cagar budaya (%)	25,73	22,81	24,85
	3.	Rasio pengunjung museum	148,54	140,62	120,26
	4.	Kunjungan Wisatawan (orang)	8.973.634	12.959.094	18.345.784
	5.	Lama Kunjungan Wisatawan (hari)	1,44 Hari	1,82 Hari	1,48 Hari
	6.	Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata (orang)	136.548	141.645	158.802

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2023-2026

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berdasarkan indikator Kunjungan wisatawan meningkat dari tahun 2023 s.d 2025 sedangkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB menurun dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 1,76% dan meningkat Kembali tahun 2025 sebesar 1,76% atau sebesar 3,36 Trilyun dari total PDRB Aceh Rp. 191,15 Trilyun pada tahun 2025 (Data BPS Triwulan III).

Capaian indikator rasio pelestarian cagar budaya tahun 2025 (25%) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 (22,81%) sebesar 2,19%. Hai ini karena adanya penambahan juru pelihara sebanyak 3 orang pada tahun 2025. Sedangkan capaian indikator Rasio pengunjung museum terus menurun dari tahun 2023 s.d 2025, hal ini disebabkan karena berkurangnya minat wisatawan yang berkunjung ke Museum, sehingga perlu dilakukan peningkatan promosi dan konten kreatif agar dapat menarik minat wisatawan ke museum. Adapun belum tercapainya target indikator lama kunjungan wisatawan di tahun 2025 karena masih rendahnya daya saing destinasi pariwisata Aceh di kancah dunia, yang salah satu penyebabnya adalah terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan di lokasi wisata, amenitas yang terbatas dan aksebilitas ke lokasi wisata yang masih sulit diakses.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja kebudayaan dan pariwisata yang telah dicapai pada tahun 2025, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

No	Indikator kinerja	Capaian 2023	Realisasi 2025			Target akhir Renstra 2023-2026	% Capaian Renstra 2023-2026
			Target 2025	realisasi 2025	Tingkat Capaian		
1.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,77	1,8	1,76	93%	2	88%
2.	Rasio pelestarian cagar budaya (%)	25,73	28,39	24,85	88%	28,85	86,66%
3.	Rasio pengunjung museum/1000 orang	148,54	130,9	120,26	92%	130,6	92,08%
4.	Kunjungan Wisatawan	8.973.634	2.836.869	18.345.784	647%	3.093.405	539,06 %
5.	Lama Kunjungan Wisatawan	1,44 Hari	3 Hari	1,48 Hari	49%	5 Hari	29,60%
6.	Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata (orang)	136.562	121.147	158.802	131%	133.026	119,38 %

Sumber : Realisasi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2023-2026

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator capaian indikator kunjungan wisatawan dan Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata telah memenuhi target akhir renstra dengan capaian target masing-masing sebesar 539,06% dan 119,38%. Sedangkan Tingkat capaian indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (88%), Rasio pelestarian cagar budaya (86,66%), Rasio pengunjung museum (92,08%) dan Lama Kunjungan Wisatawan (29,60%) belum

mencapai target akhir renstra yang telah ditentukan.

Tingkat capaian indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB diprediksi akan tercapai mengingat data yang digunakan saat ini masih data laporan Triwulan III dari BPS. Rendahnya capaian indikator lama kunjungan wisatawan lebih disebabkan karena masih lemahnya daya saing destinasi pariwisata Aceh di kancah dunia. Kondisi ini perlu segera dicarikan solusi bersama baik dalam hal perencanaan pengembangan destinasi wisata yang menarik maupun ketersediaanya anggaran setiap tahunnya untuk merealisasikan program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya target lama kunjungan wisatawan selama 5 hari pada akhir Renstra tahun 2026.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target capaian nasional

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja kebudayaan dan pariwisata yang telah dicapai pada tahun 2025, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target capaian nasional, dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Capaian Nasional

No	Indikator kinerja	Realisasi Kinerja 2025		
		Realisasi Nasional 2025	Realisasi Renstra 2025	Tingkat Capaian
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	473,37 T	3,36 T	0,71%
2	Kunjungan Wisatawan	1.108.381.900	18.345.784	1,66%
3	Lama Kunjungan Wisatawan (Data Akomodasi Hotel)	1,62 hari	1,48 Hari	91,35%
4	Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata (orang)	11.576.839	158.802	1,37%

Sumber : BPS tahun 2025

Berdasarkan data tabel 3.5 di atas, indikator kinerja daerah bidang kebudayaan yang tidak bisa dilakukan perbandingan dengan target capaian nasional karena tidak tersebut dalam Renstra Kemendikbud 2020-2025. Tingkat capaian realisasi bidang pariwisata untuk indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB mencapai 3,36 T dengan tingkat capaian sebesar 0,71% , capaian indikator kunjungan wisatawan sebesar 18,3 juta orang dengan tingkat capaian sebesar 1,66%, capaian indikator lama kunjungan wisatawan berdasarkan data lama menginap di hotel

mencapai 1,48 hari dengan tingkat capaian sebesar 91,35% yang berarti mendekati capaian kinerja nasional dan capaian penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata mencapai 141.645 orang dengan tingkat capaian 1,37%. Data di atas menunjukkan bahwa provinsi Aceh menyumbang sebesar 0,71% untuk pencapaian target kontribusi pariwisata nasional, 1,66% dalam pencapaian target kunjungan wisatawan nasional dan 1,37% untuk pencapaian target penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata.

6. Prestasi/Penghargaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Pada tahun 2025 terdapat sejumlah penghargaan yang diterima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diantaranya:

a. Penghargaan pada ajang bergengsi Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 dengan peringkat ke-4 nasional dalam Kategori Destinasi Pariwisata Ramah Muslim dan Penghargaan " Recognition For Leading The Path to Sharia Experince" yang diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, di Ballroom Jakarta International Expo, Jakarta;
b. Piagam Penghargaan atas terpilihnya Desa Wisata Iboih dalam kategori "The 3rd ASEAN Public Toilet Award (ATA)2025-2027;
c. Predikat Stand terbaik di Expo Hari Damai 2025 yang dilaksanakan di Balee Meuseraya Aceh (BMA);
d. 17 Karya Budaya Aceh yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dalam sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
e. Penghargaan Museum Kategori A kepada Museum Aceh pada ajang Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025 dari Kementrian Kebudayaan Republik Indonesia;
f. Penghargaan juara 3 kategori Promosi Pariwisata Digital dan juara 2 kategori Brand Pariwisata "Cahaya Aceh" pada ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2025 dari Kementrian Pariwisata Republik Indonesia.



Gambar 3.1

Piagam Penghargaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

7. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan serta rencana kebijakan kedepan

7.1 Terlestarikannya Cagar Budaya

Jumlah cagar budaya yang terdata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh saat ini mencapai 873 objek yang terdiri dari 860 objek berupa situs bangunan dan 13 objek berupa barang/dokumen. Target capaian pelestarian cagar budaya tahun 2025 dalam RPA adalah sebesar 28,39% (247 cagar budaya) dan realisasi capaian akhir tahun 2025 adalah sebesar 25% (218 cagar budaya). hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh hanya mampu mencapai target indikator Terlestarikannya Cagar Budaya sebesar 86,66% dari target realisasi capaian yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena Disbudpar Aceh menyesuaikan kembali prioritas pelestarian cagar budaya bagi situs cagar budaya yang sudah ada juru peliharanya. Kebijakan ini diambil karena pentingnya menjaga dan merevitalisasi kembali situs cagar budaya yang sudah ada juru pelihara dengan keterbatasan anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2025. Akan tetapi, Disbudpar Aceh optimis realisasi capaian target indikator ini pada kondisi akhir

RPA tahun 2026 sebesar 28,85% (251 cagar budaya) akan tercapai.



Gambar 3.2

Pelestarian Cagar Budaya Aceh

7.2 Rasio Jumlah Pengunjung Museum

Rasio jumlah pengunjung museum dihitung berdasarkan data jumlah kunjungan Museum Aceh dan Museum Tsunami tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah target kunjungan wisatawan ke Aceh dikalikan 1/1000. Target realisasi Rasio jumlah kunjungan museum adalah 130,9 dibandingkan dengan target kunjungan wisatawan tahun 2025 sebesar 2.836.869 orang. Sedangkan realisasinya sebesar 120,26 atau sebanyak 341.164 orang dengan capaian sebesar 92,08%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 orang wisatawan yang berkunjung ke Aceh pada tahun 2025 terdapat 120 orang wisatawan tersebut berkunjung ke Museum di Aceh.




Gambar 3.3
Museum di Aceh

7.3 Kunjungan Wisatawan

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Aceh terutama disebabkan karena telah dibukanya kembali jalur penerbangan internasional dari Malaysia ke Aceh dan penambahan jadwal penerbangan domestik. Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh tahun 2025 berdasarkan perhitungan data BPS dengan menggunakan metode *Mobile Positioning Data* (MPD) dan pintu kedatangan ke Bandara Iskandar Muda mencapai 18.345.784 orang. Capaian ini menggambarkan nilai yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPA sebanyak 2.836.869 orang atau meningkat sebesar (647%). Data Kunjungan wisatawan ke Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Data Kunjungan Wisatawan Aceh Tahun 2023 -2025

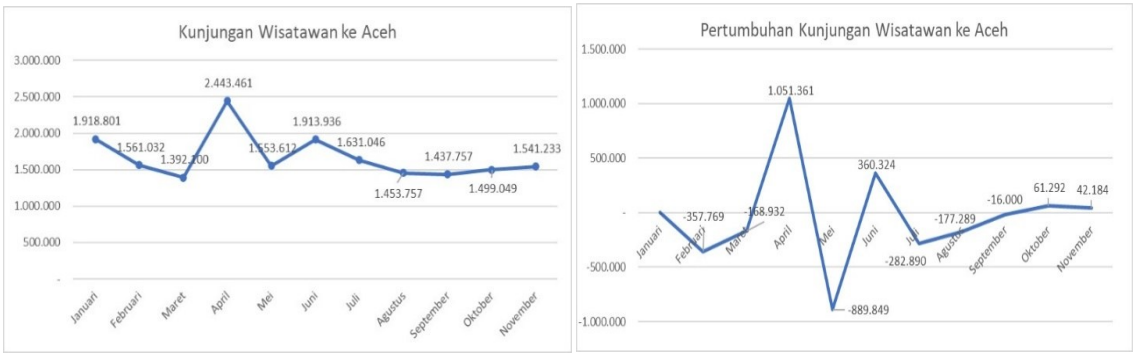
Uraian	Jumlah Kunjungan		Selisih 2024 - 2025	Persentase Kenaikan/Penurunan	
	2024	2025			
Wisman	34.097	41.489	7.392	Naik	21,67%
Wisnus	12.924.997	18.304.295	5.379.298	Naik	41,62 %
Total	12.959.094	18.345.784	5.386.690	Naik	41,57%

Sumber: Data Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan Tahun 2025, Rilis BPS (Januari – November 2025)

Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 5.386.690 orang dengan Tingkat pertumbuhan sebesar 41,57%.

Berikut ini kunjungan wisatawan ke Aceh yang dihitung dari Bulan Januari

s.d November 2025:



Gambar 3.4

Grafik Kunjungan Wisatawan dan Tren Kenaikan/Penurunan Bulan Januari s.d November Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, tren kenaikan/penurunan perjalanan wisatawan tahun 2025 berfluktuasi, tetapi pada umumnya mengalami kenaikan jika melihat trend kenaikan kunjungan perjalanan wisatawan pada Bulan September – November 2025.



Gambar 3.5

Event Atraksi Budaya dan Wisata di Penyumbang Kunjungan Wisatawan ke Aceh

7.4 Lama Kunjungan Wisatawan

Realisasi lama kunjungan wisatawan ke Aceh tahun 2025 sebesar 1,48 hari, yang mana masih belum mencapai target sebagaimana dalam RPA sebesar 3 hari disebabkan karena masih lemahnya daya saing destinasi pariwisata Aceh di kancah dunia, yang salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan yang memadai, amenitas dan aksebilitas ke lokasi wisata yang masih sulit di capai. Kondisi ini perlu segera dicarikan solusi bersama baik dalam hal perencanaan pengembangan destinasi wisata yang menarik, ketersediaan anggaran setiap tahunnya untuk merealisasikan program dan kegiatan serta meningkatkan investasi dan promosi pariwisata dalam mendukung tercapainya target kunjungan dan lama tinggal wisatawan pada akhir RPA tahun 2026.



Gambar 3.6

Daya Tarik Wisata Unggulan Aceh

7.5 Kontribusi Sektor Pariwisata

Pada tahun 2025 di dalam RPA 2023-2026 ditetapkan target kontribusi sektor pariwisata sebesar 1,9%. Berdasarkan perhitungan kontribusi dari penyediaan akomodasi dan makan minum terealisasi kontribusi pariwisata sebesar 1,76%. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dihitung berdasarkan besarnya kontribusi dari lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dimana sumbangan PDRB Aceh pada tahun 2025 periode s.d Bulan September (Triwulan III) sebesar Rp. 3,36 Trilyun dari total PDRB Aceh Rp. 191,15 Trilyun berdasarkan harga berlaku atau 1,76%. Angka kontribusi PDRB sektor pariwisata ini secara angka meningkat dibandingkan

periode Triwulan III tahun sebelumnya sebesar Rp. 3,09 Trilyun dari total PDRB Aceh tahun 2024. Capaian kontribusi PDRB sektor pariwisata yang berkurang dari target RPA 2025 disebabkan antara lain:

a. Data kontribusi PDRB sektor pariwisata yang digunakan masih pada kondisi Triwulan III.
b. Total kontribusi PDRB sektor pariwisata dipengaruhi oleh jumlah total kontribusi PDRB lapangan usaha lainnya.

Jumlah Kunjungan wisatawan ke Aceh sangat berkontribusi terhadap peningkatan kontribusi PDRB Sektor Pariwisata selama tahun 2025 sebesar 1,76%, Namun untuk Tingkat kunjungan wisatawan pada tahun 2025 tidak mempengaruhi secara signifikan hal ini dapat dilihat pada tabel dan chart di bawah ini:

Tabel 3.7
Korelasi Peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh terhadap peningkatan kontribusi PDRB Sektor Pariwisata

Indikator Kinerja	Tahun Anggaran			
	2022	2023	2024	2025
Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	1,69%	1,77%	1,72%	1,76%
Kunjungan wisatawan	6.954.578	8.973.634	12.959.094	18.345.784

Sumber : Data Rilis BPS Tahun 2022-2025

Gambar 3.7
Tabel Korelasi Peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh terhadap peningkatan kontribusi PDRB Sektor Pariwisata

Pada tabel 3.7 dan gambar 3.7 di atas, terlihat bahwa semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke Aceh sedangkan Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata untuk tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,76 % dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga dapat diartikan bahwa lapangan usaha akomodasi dan makan minum lebih banyak menyumbang kontribusi terhadap PDRB Aceh pada tahun 2025 dibangdingkan tahun sebelumnya.



Gambar 3.8

Ragam Event Atraksi Budaya dan Pariwisata Penyumbang Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata

7.6 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata

Capaian indikator Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dihitung berdasarkan data karakteristik penduduk bekerja sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Realisasi capaian Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata tahun 2025 sebesar 158.802 orang atau sebesar 131% dari target capaian RPA. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata berkaitan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh yang menyumbang peningkatan hunian akomodasi dan belanja makan minum wisatawan di Aceh dan berpengaruh terhadap tumbuhnya sektor usaha bidang pariwisata dalam menyerap tenaga kerja.



Gambar 3.9

Ekraf Aceh Penyumbang Tenaga Kerja Sektor Pariwisata

8. Analisis efesiensi atas penggunaan sumberdaya

Sumber daya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh secara umum memiliki komposisi 11% Magister, 44% Sarjana, 2% D-IV, 10% D-III, dan 33% SLTA. Komposisi SDM ini menggambarkan bahwa pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata proporsi SDM yang telah menempuh sarjana dan magister mempunyai tingkat proporsi yang tinggi yaitu 66%. Hal ini menandakan bahwa proporsi SDM yang berpendidikan cukup telah melebihi 50% dari SDM yang tersedia, hanya saja dalam pelaksanaan pekerjaan masih belum memiliki kemampuan berinovasi dan berkreasi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan belum maksimalnya kinerja pegawai dan kreatifitas yang terbangun dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian dan pelaporan hasil pekerjaan. Untuk meningkatkan kinerja diperlukan adanya pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi kerja pegawai yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya.

Disisi lain dari sumberdaya anggaran dan fasilitas pendukung kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan telah menggambarkan sistem perencanaan penganggaran yang sudah efektif dan efisien. Dari ketersediaan alokasi anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025, menggambarkan penggunaan anggaran pada 10 program berkategori efisien dan sebagaimana yang tertera pada tabel 3.8.

9. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditunjang oleh perencanaan yang tepat dan berhasilnya program/kegiatan dilaksanakan. Lebih jauh program/kegiatan akan sangat menunjang berhasil atau gagalnya organisasi karena program/kegiatan merupakan kesatuan rangkaian yang mempengaruhi keseluruhan kinerja organisasi. Dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh terdapat beberapa kegiatan pada penunjang urusan pemerintah daerah, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, dan event yang tidak terlaksana namun secara umum target kinerja dinas telah terpenuhi.

Adapun program penunjang keberhasilan ketercapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh khususnya indikator kontribusi sektor pariwisata yaitu Program Peningkatan Data Tarik Pariwisata (Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata), Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengelolaan Permuseuman melalui pelaksanaan kegiatan event atraksi budaya dan pariwisata serta efektifnya promosi pariwisata Aceh sehingga semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke Aceh. Demikian juga ketercapaian target indikator penyerapan tenaga kerja ke Aceh disebabkan karena keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkontribusi kepada semakin tumbuhnya usaha pariwisata dan terlatihnya sumber daya manusia industri pariwisata kreatif.

Adapun Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menyumbang terhadap ketidaktercapaian indikator Terlestarikannya Cagar Budaya walaupun realisasi anggarannya mencapai 99,59% disebabkan karena penyesuaian prioritas anggaran untuk pelestarian cagar budaya yang sudah ada juru peliharanya, sehingga pelestarian situs cagar budaya baru tidak dapat dilaksanakan sesuai target RPA di tahun 2025 dikarenakan keterbatasan anggaran.

10. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Adapun capaian indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025 sesuai dengan RPA 2023-2026 dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 2023- 2026 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1.9	1,76	93
2	Rasio Pelestarian Cagar Budaya	%	28,39	24,85	88
3	Rasio Jumlah Pengunjung Museum	Rasio pengunjung /1000	130	120,26	92
4	Kunjungan wisatawan	Orang	2.836.869	18.345.784	647
5	Lama kunjungan wisatawan	Hari	3	1,48	49
6	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata	Orang	121.147	158.802	131

Sumber: Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.8 diatas, terlihat bahwa pada hanya 2 (dua) capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan penjabaran strategi dinas untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan pemerintah daerah berada pada tingkat capaian di atas 100% yaitu Kunjungan wisatawan (647%) dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata (131%), indikator Rasio Pelestarian Cagar Budaya sebesar (88%), Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (93%) dan Lama Kunjungan Wisatawan (49%) masih berada dibawah Tingkat capaian kinerja 100%. Ketidaktercapaian capaian indikator kinerja daerah pada tahun pertama RPA atas 4 (empat) indikator tersebut akan menjadi cacatan untuk evaluasi pada tahun anggaran selanjutnya sehingga target capaian IKD pada akhir RPA tahun 2026 akan tercapai.

Adapun capaian realisasi belanja anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.9

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)
	BELANJA DAERAH	**91.575.614.095.30**	**90.598.066.496.62**	**98,93**	**100**
A.	**BERDASARKAN JENIS BELANJA**				
	Belanja Operasi	**65.295.314.254.30**	**64.376.731.266**	**98,59**	**100**
	Belanja Modal	**26.280.299.841.00**	**26.221.335.231**	**99,78**	**100**
B.	**BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN**				
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**31.685.009.408**	**31.150.856.662**	**98,31**	**100**
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	315.683.616	308.947.146	97,87	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.478.232.821	24.147.068.750	98,65	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.820.723	100.317.700	92,19	50
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.115.458.520	1.084.594.186	99,87	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226.689.650	220.099.400	97,09	100
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.558.362.269	4.444.302.731	97,50	100
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	881.761.809	845.526.749	95,89	100
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**5.978.466.493**	**5.935.521.593**	**99,28**	**100**
2.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.998.150.739	2.965.658.612	98,92	100
2.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota	2.980.315.754	2.969.862.981	99,65	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)
	dalam Daerah Provinsi				
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**836.146.308**	**808.682.100**	**96,72**	**100**
3.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	836.146.308	808.682.100	96,72	100
4.	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**807.622.268**	**804.540.502**	**99,62**	**100**
4.1	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	807.622.268	804.540.502	99,62	100
5.	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**10.245.809.162**	**10.198.343.774**	**99,54**	**100**
5.1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	10.245.809.162	10.198.343.774	99,54	100
6.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**21.696.044.511**	**21.654.128.563**	**99,81**	**100**
6.1	Pengelolaan Museum Provinsi	21.696.044.511	21.654.128.563	99,81	100
7.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**8.925.232.095**	**8.824.999.877**	**98,88**	**100**
7.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.254.005.931	3.197.196.077	98,28	100
7.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	5.386.841.307	5.347.943.946	99,28	100
7.3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	284.384.857	279.859.854	98,41	100
8.	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**10.692.040.744**	**10.540.938.677**	**98,59**	**100**
8.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	10.692.040.744	10.540.938.677	98,59	100
9.	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN**	**52.542.442**	**29.017.240**	**55,23**	**100**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)
	PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
9.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	52.542.442	29.017.240	55,23	100
10.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**656.700.664**	**651.037.509**	**99,14**	**100**
10.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	656.700.664	651.037.509	99,14	100

Sumber: Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.9 di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran tahun 2025 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah sebesar Rp90.598.066.496.62 atau 98,93% dari total anggaran sebesar Rp91.575.614.095.30. Pelaksanaan anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
   - **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
     1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
     3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
     1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - **c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
     1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - **d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
     1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya

b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten Kota dalam Daerah Provinsi

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

a. Pembinaan Kesenian yang Mayarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

4. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

a. Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

5. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

a. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

1. Pemanfaatan Cagar Budaya

6. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

a. Pengelolaan Museum Provinsi

1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
2. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

7. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

1. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
2. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

c. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1. Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi

8. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

2. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

9. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMAMFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif

10. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

1. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
2. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
3. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

B. ANALISA EFISIENSI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efesiensi /*efi-si-en-si*//éfisiénsi/ ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya); kedayagunaan; ketepatgunaan; kesangkilan; kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

$$Efisiensi = \frac{Anggaran\ yang\ terealisasi}{\text{Anggaran yang direncanakan}}\ X\ 100\%$$

Tabel 3.10

Kriteria Nilai Tingkat Efisiensi

Interval	Tingkat Efisiensi
≥100%	Sangat Efisien
90%- 100%	Efisien
80%- 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Kurang Efisien
≤60%	Tidak Efisien

Salah satu efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumber daya anggaran. Selain jumlah pejabat dan staf yang berada dalam unit kerja, sumberdaya finansial merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja. Tahun 2025 jumlah sumber daya anggaran yang dialokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebesar Rp72.031.236.783,00 dan setelah perubahan anggaran bertambah menjadi RP91.575.614.095,30 dengan persentase realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp90.598.066.496.62 atau 98,93%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025 sebesar 98,93% atau pada katagori "Efisien". Gambaran secara rinci tingkat efisiensi anggaran pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11

Efisiensi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	Efisien (%)	Ket
	BERDASARKAN JENIS BELANJA				
1	Belanja Operasi	**65.295.314.254.30**	**64.376.731.266**	**98,59**	**Efisien**
2	Belanja Modal	**26.280.299.841.00**	**26.221.335.231**	**99,78**	**Efisien**
	BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN				
a	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**31.685.009.408**	**31.150.856.662**	**98,31**	**Efisien**

b	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**5.978.466.493**	**5.935.521.593**	**99,28**	**Efisien**
c	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**836.146.308**	**808.682.100**	**96,72**	**Efisien**
d	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**807.622.268**	**804.540.502**	**99,62**	**Efisien**
e	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**10.245.809.162**	**10.198.343.774**	**99,54**	**Efisien**
f	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**21.696.044.511**	**21.654.128.563**	**99,81**	**Efisien**
g	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**8.925.232.095**	**8.824.999.877**	**98,88**	**Efisien**
h	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**10.692.040.744**	**10.540.938.677**	**98,59**	**Efisien**
i	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**52.542.442**	**29.017.240**	**55,23**	**Efisien**
j	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**656.700.664**	**651.037.509**	**99,14**	**Efisien**

Sumber: Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.11 diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2025 secara umum telah efisien. Hal ini terlihat pada alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja diatas 95% yang semuanya masuk kategori efisien. Akan tetapi terdapat satu program yang hanya tercapai efisiensi sebesar 55,23%. Hal ini berarti pelaksanaan program tersebut tidak efisiensi disebabkan karena tidak sinkronnya total capaian dengan target capaian kegiatan yang direncanakan.

C. KENDALA DAN SOLUSI

Dalam rangka merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala yang cukup berpengaruh yakni:

1. **Kendala**

   a. **Urusan Kebudayaan**

      a) Belum terealisasinya DED pelestarian Cagar Budaya yang sudah direncanakan;
      b) Belum sempurnanya pengintegrasian Data-Data Pokok Kebudayaan Aceh;
      c) Belum maksimalnya pembinaan SDM Kebudayaan dan Lembaga Kesenian Aceh
      d) Masih minimnya ketersediaan SDM pendukung Kebudayaan;
      e) Masih minimnya partisipasi dan dukungan anggaran kab/kota dalam mendukung pelaksanaan event-event kesenian dan kebudayaan;
      f) Jumlah Kunjungan/wisatawan Museum Aceh masih kurang dari Target 371.346 orang, hanya tercapai 341.164 orang. Hal ini dipengaruhi oleh tidak maksimalnya jam operasional Museum Tsunami pada tahun 2025 yang disebabkan sedang adanya kegiatan Rehab Gedung Museum Tsunami

   b. **Pariwisata**

      a) Terjadinya bencana alam di akhir tahun 2025 menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas pendukung kepariwisataan yang berakibat kepada menurunnya kunjungan wisatawan ke objek wisata terdampak bencana yang dapat menyebabkan menurunnya pendapatan ekonomi maasyarakat di sektor pariwisata;
      b) Peningkatan SDM pariwisata masih minim dilakukan, hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran untuk peningktan SDM belum memadai;
      c) Kekurangan pemandu yang mampu berbahasa asing dan sudah bersertifikasi;
      d) Biaya berwisata ke Aceh yang mahal karena masih tingginya harga tiket pesawat udara yang dapat menyebabkan penurunan kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Aceh;

e) Masih rendahnya minat investor dalam berinvestasi di sektor pariwisata Aceh;
f) Jumlah sertifikasi profesi pariwisata yang masih dibawah 10% dari jumlah total tenaga kerja sektor pariwisata di Aceh;
g) Database untuk ekonomi kreatif di Aceh belum punya tolak ukur di bidangnya karena masih menggunakan data yang dikumpulkan dilapangan untuk mengetahui mana kegiatan ekraf dan bukan;
h) Menurunnya event atraksi wisata di Aceh akibat dari keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap penurunan lama tinggal wisatawan di Aceh;
i) Partisipasi, promosi pada kegiatan event yang dilaksanakan di tingkat Nasional dan Internasional belum Maksimal dilakukan dikarenakan terkendala dengan anggaran yang disediakan untuk promosi.

2. Solusi

a. Urusan Kebudayaan

a. Mempercepat realisasi DED pelestarian Cagar Budaya melalui dukungan prioritas anggaran pada tahun 2026;
b. Peningkatan koodinasi dengan Kab/Kota dalam percepatan penyediaan data dukung integrasi Data-Data Pokok Kebudayaan Aceh;
c. Peningkatan Pelatihan / Bimtek SDM Kebudayaan;
d. Peningkatan event kesenian sebagai Upaya peningkatan pembinaan pelaku dan Lembaga kesenian;
e. Peningkatan pelestarian Bahasa daerah;
f. Peningkatan koordinasi dengan kab/kota dalam pelaksanaan event-event kesenian dan kebudayaan

b. Urusan Pariwisata

a. Peningkatan Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas wisata unggulan yang terdampak bencana banjir;
b. Peningkatan Pembinaan SDM untuk masayarakat di Lokasi objek wisata;
c. Perlunya intervensi pemerintah Aceh dalam Upaya penurunan harga tiket pesawat udara;

d. Meningkatkan jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang bersertifikasi profesi;
e. Memberikan insentif kepada investor yang mau berinvestasi di Aceh;
f. Peningkatan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan dukungan anggaran yang memadai.

BAB 4 PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LkiJ) merupakan salah satu acuan bagi pimpinan untuk mengontrol pencapaian kinerja unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pertanggungjawaban yang objektif. Sejauh ini perkembangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Khususnya di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menunjukkan peningkatan dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Berdasarkan capaian kinerja yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diharapkan akan menjadi media umpan balik bagi peningkatan kinerja, program maupun kegiatan di tahun berikutnya.

a. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada Tahun 2025, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh perlu ditingkatkan lagi di masa yang akan datang, mengingat peran dan fungsi sangat strategis dalam memberikan masukan maupun rekomendasi kebijakan maupun program kepada unit-unit terkait di lingkungan Pemerintah Aceh;
2. Secara khusus:
    a. Dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka menyamakan persepsi pelaksanaan program dan kegiatan;
    b. Hasil Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwispata Aceh di Tahun 2025 agar digunakan sebagai referensi dalam penyusunan indikator kinerja serta pencapaiannya di tahun mendatang;
    c. Perlu dilakukan peningkatan dan penajaman indikator kinerja agar perhitungan dan evaluasi kinerja dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Hal tersebut perlu pula diikuti dengan perbaikan terhadap pelaksanaan

d. Perlu adanya mekanisme pengganggaran berbasis kinerja yang sinergis dengan sistem akuntabilitas kinerja;

e. Perlu menentukan target yang realistis yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan kapasitas dan penyediaan anggaran pembiayaan yang sesuai dengan beban target yang ditentukan;

f. Dibutuhkan penataan dan konsistensi antara program dan kegiatan, serta antara kegiatan pokok Renstra dan Renja dengan uraian kegiatan tahunan baik yang diuraikan dalam APBA maupun dalam indikator kinerja utama (IKU), Penetapan kinerja (PK) agar setiap kegiatan dapat berkontribusi secara hirarki dan terstruktur terhadap sasaran yang ditargetkan;

g. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik maka pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan, sehingga dapat memaksimalkan pencapaian kinerja organisasi.

Demikian Laporan Kinerja (LkiJ) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025 disampaikan, dengan harapan dapat dijadikan tolok ukur penilaian terhadap kinerja selama tahun 2025 dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih *Clean and Good Governance*.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

DEDY YUSWADI, A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19770328 199603 1 001

PEMERINTAH ACEH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
JalanTgk. Chik KutaKarang Nomor 03 Banda Aceh, Pos 23121
Telepon (0651) 26206, 23692, Faksimili (0651) 33723
Email :info@disbudparaceh.id, Website : http://disbudpar.acehprov.go.id

Nomor : 000.8.6.3/073
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : *Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025*

Banda Aceh, 27 Januari 2026 M
08 Sya'ban 1447 H

Yang Terhormat:
Sekretariat Daerah Aceh
Up. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh
Di-
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 000.8.6.3/19878 tanggal 06 Januari 2026 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan *Hardcopy dan Softcopy* Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

2. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

DEDY YUSWADI, AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19770328 199603 1 001

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh Kode Pos 23114
Telepon (0651) 7551377, Faksimil (0651) 7553119

Banda Aceh, 06 Januari 2026
17 Rajab 1447

Nomor : 000.8.6.3/19878
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Eksemplar
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

Yang Terhormat.
1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh
2. Para Kepala Biro di Lingkungan Setda Aceh

Masing-masing
di
Tempat

1. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa "Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir". Penyusunan/penyampaian Laporan Kinerja dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, dengan mengikuti contoh format Laporan Kinerja sebagaimana terlampir.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat hasil capaian kinerja dalam Laporan Kinerja SKPA akan dikompilasi menjadi Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2025, kami harap kepada Saudara segera menyusun dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025 dan menyampaikan kepada kami u.p. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh paling lambat tanggal **30 Januari 2026**. Apabila dalam penyusunan Laporan Kinerja mengalami kendala, dapat berkoordinasi/ berkonsultasi dengan Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh, dengan narahubung Sdr. Deddy, S.Sos, M.Si (HP: 081260974466) atau Sdr. Fajri Mustaqim, SE, MM (HP: 081269978882).
3. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan terima kasih.

a.n GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

M. NASIR, S.IP, MPA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197402072001121001

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Gubernur Aceh (sebagai laporan)

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Aceh
Nomor : 000.8.6.3/19878
Tanggal : 06 Januari 2026

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Perjanjian Kinerja SKPA Tahun 2025);
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Realisasi 2025			Target Akhir RPJM (2029)	% Capaian RPJM 2029
			Target 2025	Realisasi 2025	% tingkat capaian		
1							
dst							
Rata-rata persentase tingkat capaian							

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Prestasi Daerah/penghargaan (yang dibuktikan dengan photo penerima penghargaan/piagam)
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan serta rencana kebijakan kedepan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.